

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang kompleks di Indonesia, terutama di kalangan perempuan muda yang memasuki dunia kerja. Meskipun berbagai program telah digalakkan untuk menunda usia pernikahan melalui peningkatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, data menunjukkan bahwa faktor-faktor struktural seperti kondisi kerja, pendapatan, dan lokasi tempat tinggal masih memainkan peran penting dalam mendorong keputusan untuk menikah muda. Pekerja perempuan Generasi Z menghadapi tantangan tersendiri dalam dunia kerja yang dinamis dan sering kali tidak stabil. Dalam konteks ini, analisis regresi logistik dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel ekonomi dan sosiodemografis yang berpengaruh terhadap kecenderungan pernikahan dini.

Hasil regresi logistik pada total sampel menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan menikah dini. Upah di bawah UMP, bekerja di sektor industri, jam kerja panjang, dan kepemilikan keterampilan secara signifikan meningkatkan peluang terjadinya pernikahan dini. Sebaliknya, bekerja di sektor formal, tinggal di wilayah perkotaan, dan memiliki pendidikan menengah (SMA/ sederajat) secara signifikan menurunkan kecenderungan tersebut. Menariknya, tingkat pendidikan tinggi ( $\geq$ diploma) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap keputusan menikah dini. Dari keempat model yang diuji, model terakhir (kolom 4 Tabel 4.4) yang mengakomodasi efek tetap waktu dan provinsi menunjukkan performa terbaik, dilihat dari *Wald chi<sup>2</sup>*, AIC, BIC, dan AUC. Temuan ini menegaskan bahwa dimensi ekonomi, sektor pekerjaan, jenjang pendidikan, keterampilan, serta lokasi geografis merupakan faktor yang saling berinteraksi dalam memengaruhi keputusan pernikahan dini.

Analisis berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa pengaruh variabel terhadap pernikahan dini lebih kuat di desa dibandingkan kota. Upah di bawah UMP, jam kerja panjang, dan pendidikan menengah memiliki efek yang lebih besar di desa. Pendidikan  $\geq$ diploma hanya signifikan di desa dengan arah positif. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa konteks sosial-ekonomi dan geografis memainkan peran penting dalam membentuk keputusan pernikahan dini. Oleh karena itu, intervensi kebijakan perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah, khususnya dengan memberikan perhatian lebih pada kondisi perdesaan yang cenderung lebih rentan terhadap praktik pernikahan dini akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari analisis regresi logistik yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan berbagai faktor sosial-ekonomi terhadap kecenderungan pernikahan dini di kalangan pekerja perempuan Generasi Z, maka beberapa saran dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, disarankan untuk memperkuat kebijakan upah layak, khususnya bagi pekerja perempuan di sektor informal dan industri. Pemerintah juga perlu memperluas akses pelatihan keterampilan kerja, terutama di desa, serta memperkuat program beasiswa dan pendidikan tinggi bagi perempuan dari keluarga kurang mampu. Pengaturan jam kerja yang fleksibel, edukasi kesehatan reproduksi di sekolah, serta penegakan hukum usia minimal pernikahan juga penting untuk mencegah pernikahan dini secara sistemik.
2. Bagi masyarakat, dukungan keluarga dan komunitas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendorong remaja perempuan menunda pernikahan. Orang tua dan tokoh masyarakat perlu aktif mempromosikan pentingnya pendidikan, kemandirian ekonomi, dan kesiapan emosional sebelum menikah. Kampanye komunitas serta forum edukatif berbasis lokal dapat menjadi sarana untuk mengubah pandangan tradisional terhadap pernikahan dini.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam analisis konteks lokal, khususnya di desa, dengan pendekatan kualitatif dan longitudinal. Penelitian lebih lanjut juga perlu mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang ada serta mengidentifikasi faktor sosiokultural yang belum tergambarkan secara kuantitatif. Temuan tersebut akan memperkaya dasar ilmiah bagi kebijakan pencegahan pernikahan dini yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.